



RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**Disampaikan dalam Pertemuan dengan Banggar DPR - RI
Jakarta, 4 September 2018**



1

Sasaran Makro Pembangunan Nasional

2

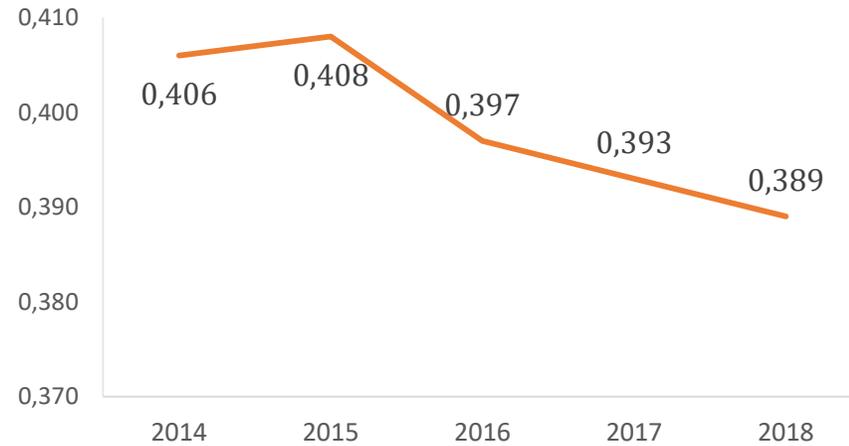
Pokok-Pokok RKP 2019

1

Sasaran Makro Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan

**ANGKA
KETIMPANGAN**
turun menjadi
0,389
dan semakin membaik



Keterangan: Susenas, Maret 2014 – Maret 2018



INDEKS PEMBANGUNAN

MANUSIA

naik menjadi

70,81

68,90 → **70,81**
(2014) (2017)

Sumber: BPS, April 2018



**TINGKAT
PENGANGGURAN**
turun menjadi
5,13%

5,70% → **5,13%**
(Februari 2014) (Februari 2018)

Sumber: Sakernas, Februari 2018

Tingkat kemiskinan turun menjadi **9,82%** dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi **25,95 juta jiwa**



Persentase penduduk miskin
berkurang (persen)

11,25
2014 (Mar)

9,82
2018 (Mar)

Jumlah penduduk miskin berkurang
(juta jiwa)

28,28
2014 (Mar)

25,95
2018 (Mar)

Sumber: Susenas, Maret 2018

Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2019



Pertumbuhan Ekonomi
5,3%



Tingkat Pengangguran Terbuka
4,8–5,2%



Tingkat Kemiskinan
8,5–9,5%



Rasio Gini
0,380–0,390



Indeks Pembangunan Manusia
71,98

2

Pokok-Pokok RKP 2019



Menajamkan
Prioritas Nasional



Memastikan
Pelaksanaan
Program



Menajamkan
Integrasi
Sumber Pendanaan

Belanja K/L, Belanja Non K/L,
Belanja Transfer ke Daerah, PHLN,
BUMN, PINA dan Swasta

Tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019
RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan)
untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN

Tema RKP

“Pemerataan
Pembangunan
untuk
Pertumbuhan
Berkualitas”



1

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar



2

Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman



3

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya



4

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air



5

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

PP 1

Percepatan Pengurangan Kemiskinan



Peningkatan indeks bantuan PKH bagi 10 juta KPM



Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai bagi 15,6 juta KPM



Subsidi energi tepat sasaran bagi penduduk miskin dan rentan



Bantuan pendidikan bagi 20,1 juta anak usia sekolah

Perluasan bantuan iuran kesehatan bagi 107,2 juta jiwa



Pelepasan Tanah Obyek Reforma Agraria sebesar 57.323 ha dan pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 300 ribu ha

PP 2

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Imunisasi dasar serta penyaluran alat dan obat kontrasepsi



Penurunan stunting melalui ASI eksklusif dan tablet tambah darah (TTD)

Perluasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) terpadu



PP 4

Peningkatan Akses Perumahan dan Permukiman Layak



Kualitas hunian dan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)



Akses air minum dan sanitasi bagi rumah tangga



Kualitas udara ambien dan pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)

PP 3

Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas



Peningkatan pendidik yang berkualitas



Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan di daerah 3T



Pelayanan berbasis inklusi sosial

PP 5

Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

Perluasan verifikasi validasi data serta layanan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan



Percepatan kepemilikan dan sinkronisasi dokumen kependudukan (akta kelahiran, NIK)



PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

- Bantuan non tunai bersyarat bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anak balita, usia sekolah, ibu hamil, penyandang disabilitas dan lanjut usia
- Peningkatan bantuan 2x lipat untuk mengembalikan nilai bantuan dari 9% (saat ini) menjadi 16% dari total pengeluaran (seperti saat diluncurkan)



BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)

- BPNT ditujukan untuk pengurangan beban pengeluaran pangan, perbaikan nutrisi, dan mendorong inklusi keuangan bagi 15,6 juta KPM
- BPNT dilaksanakan bertahap ke seluruh Kabupaten/Kota sejalan dengan kesiapan jaringan agen, perbankan, kesiapan sinyal, dan dukungan Pemda



KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

- Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anak
- Tahun 2019 pemberian bantuan pendidikan diberikan bagi 20,1 juta anak usia sekolah, naik dari sebelumnya sebesar 19,7 juta jiwa pada tahun 2018



KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)

- Penerima Bantuan Iuran JKN-KIS ditingkatkan hingga 107,2 juta jiwa (40 persen penduduk berpendapatan terendah)
- Kemensos menuntaskan verifikasi dan validasi data 107,2 juta jiwa pada akhir tahun 2018

Beberapa Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan ditujukan untuk mencegah kelompok rentan tidak kembali miskin

Dana Desa

- Meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat desa.
- Mengatasi kemiskinan dan stunting melalui peningkatan pendapatan.
- Mengurangi ketimpangan pembangunan desa-kota.



Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- Memberikan kredit/pembiayaan sektor produktif: pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, industri, dan simpan pinjam.
- Mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
- Skema subsidi bunga 7% melalui 41 Penyalur dan 11 Perusahaan Penjamin

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

- Fasilitas kemandirian usaha ultra mikro bagi mereka yang belum layak perbankan dan KUR.
- Maksimal Rp10 juta/nasabah dengan bunga 2-4% dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- Sumber pendanaan: APBN, kontribusi Pemda dan lembaga keuangan domestik / lokal.

Permodalan Nasional Madani (PNM)

- Meningkatkan layanan dan pendampingan usaha untuk percepatan perkembangan usaha bagi keluarga rentan.
- Mengakselerasi nasabah naik kelas, mendorong inklusi keuangan dan terlibat dalam bisnis digital.
- Mendorong pengurangan ketimpangan.



PP 1 Peningkatan konektivitas dan TIK



Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut



Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan



Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi



Keselamatan Transportasi



Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK

PP 2 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Akses dan kualitas pelayanan kesehatan



Akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua

Pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu-hilir



Infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antar provinsi, kabupaten/kota, distrik, dan kampung

PP 4 Penanggulangan Dampak Bencana



Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Sarana dan Prasarana Kebencanaan



Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana

Penguatan Manajemen Kebencanaan



PP 3 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa



Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi



Percepatan Pembangunan Desa

PP 5 Peningkatan Sistem Logistik

Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Pertanian dan Perikanan



Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik

Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik



PP 1 Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian



Peningkatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan

Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan



Peningkatan mutu, sertifikasi, dan standarisasi hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan



Perkuat kelembagaan dan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan



Peningkatan sarana dan prasarana pendukung nilai tambah pertanian, perikanan dan kehutanan



PP 2 Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi



Pengembangan dan peningkatan investasi industri hulu non-agro dan pendukung

Peningkatan daya saing industri andalan non-pangan



Pengembangan 7 KI dan 6 KEK industri/logistik

PP 4 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja



Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha

Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi 1,4 juta orang



Sertifikasi kompetensi bagi 1 juta orang

Peningkatan keterampilan wirausaha



PP 5 Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

Penelitian dan pengembangan bidang keilmuan strategis penunjang produktivitas



Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas

Penyiapan SDM IPTEK (peneliti dan perekayasa)



Perkuat inovasi dan penguasaan teknologi *frontier*

Garis Besar Kebijakan Prioritas Nasional 4

PP 1 Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

 Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi Lainnya

Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik



 Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri



 Efisiensi Energi

PP 2 Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan



 Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan



 Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan

 Stabilisasi Harga Pangan

PP 3 Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air

 Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem

Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif



 Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air

Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air



PP 4 Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan

 Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup



 Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penguatan Kelembagaan Regulasi dan Penegakan Hukum di Bidang SDA dan LH



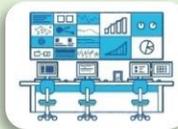
PP 1

Kamtibmas dan Keamanan Siber



Pemenuhan
peralatan khusus
Polri

Pembangunan *Command
Center*



Operasi intelijen siber

Pencegahan dan
pemberantasan narkoba



Penanganan Konflik Sosial

Deradikalisasi



PP 2

Kesuksesan Pemilihan Umum



Peningkatan kualitas
tahapannya Pemilu 2019

Pendidikan pemilih



Pengawasan integritas ASN

PP 4

Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi



Keadilan Restoratif

Penerapan kebijakan Kepemilikan
Manfaat



Implementasi E-Gov terintegrasi

Kelembagaan manajemen talenta



PP 3

Pertahanan Wilayah Nasional



Operasi keamanan laut

Penguatan pertahanan perbatasan



Modernisasi Alutsista

PP 5

Efektivitas Diplomasi



Pelayanan dan perlindungan WNI



Kerjasama Selatan-Selatan



Perluasan pasar non-tradisional di
kawasan Afrika



TERIMA KASIH

